

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

United Nation World Tourism Organizations (UNWTO) menjelaskan mengenai sektor pariwisata merupakan sektor unggulan (*tourism a leading sector*) dan menjadi salah satu kunci penting pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat (Nasution et al., 2018). Presiden Jokowi pada KTT Asian Timur 2015 menegaskan komitmen Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menurut (Ferdian et al., 2019), sebagai langkah agar Indonesia dapat menjadi poros bagi kemaritiman didunia salah satunya terletak pada bidang pariwisata, dengan kenyataan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang didunia mencapai 99.093 km.

Pesisir Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung yang merupakan daerah otonomi baru dan Kabupaten yang memisahkan diri dari Lampung Barat yang ditetapkan UU No 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 25 Oktober 2012 dan pada tanggal 22 April 2013 diresmikan. (UU RI,2012). Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah tropis yang terletak pada 5°21'52"- 5°28'62 Lintang Selatan dan 105°48'20"- 105°48'24" Bujur Timur, terletak di ujung bagian

barat Provinsi Lampung yang bagian barat wilayahnya merupakan garis pantai Samudera Hindia (Bappeda, n.d.). Kabupaten Pesisir Barat mempunyai luas wilayah 2.907,23 km², terdiri dari 11 Kecamatan. Pesisir Barat merupakan daerah pesisir yang mempunyai garis pantai sepanjang 210 km yang bisa dinikmati sepanjang perjalanan. Dilansir dari (Wisato.id, n.d.) terdapat 10 objek wisata yang terkenal di Pesisir Barat 5 diantaranya yaitu, Pantai Tanjung Setia yang menjadi surga bagi para peselancar dunia dengan ketinggian ombak mencapai 7 meter dibuktikan dengan adanya *event* surfing internasional yang diikuti oleh 51 peselancar dari berbagai negara pada tahun 2017 dan tahun 2018 diikuti oleh 107 peserta dari berbagai negara. Kemudian ada pantai Karang Nyimbor memiliki keindahan sunset. Ketiga, pantai Batu Guri yang terdapat di Pulau pisang yaitu pantai dengan batu-batu besar. Keempat, Pantai Labuhan Jukung Krui yang juga menyuguhkan hamparan laut luas. Kelima yaitu pantai Melasti yang berlokasi di Pekon Marang yang menjadi ciri khasnya karena penduduknya hampir semua beragama Hindu sehingga nuansa Bali sangat kental. Pesisir Barat setiap tahunnya mengadakan *event* wisata seperti Semarak Pulau Pisang, Festival Teluk Stabas dan juga *World Surfing League* (WSL) untuk menarik minat wisatawan mengunjungi Pesisir Barat. Terbukti dengan peningkatan kunjungan wisatawan manca negara pada tahun 2017 mencapai 15.000 orang dan meningkat pesat pada 2018 dengan 110.000 orang.

Namun, segala hal yang sudah diperbuat oleh pemerintah kabupaten dan Dinas Pariwisata belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebagai contoh, melansir dari (Fisoma, 2020), Kepala Dinas Pariwisata Pesisir Barat

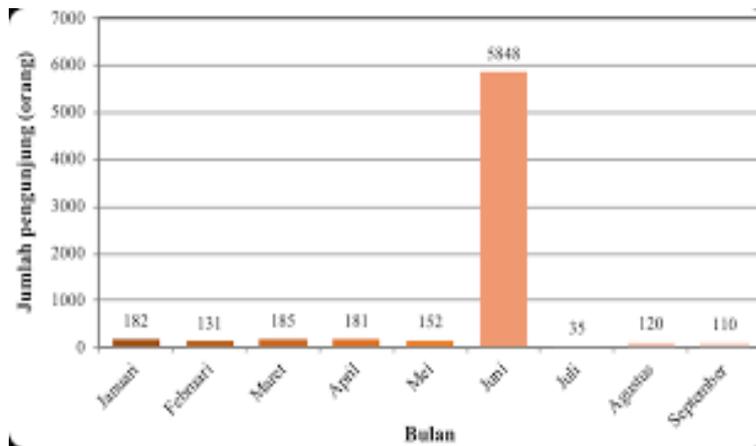
Audi Marpi menyebutkan bahwa pada tahun 2017 kawasan wisata Labuhan Jukung diberlakukan tarif parkir sehari pada libur tahun baru pemerintah Pesisir Barat mendapat PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 10 juta. Sedangkan pada tahun 2018 tepatnya pada libur Idul Fitri 1439H dari H+1 hingga H+5 retribusi kendaraan dan masyarakat yang memasuki kawasan wisata Labuhan Jukung mencapai 30 juta rupiah. Dia juga mengatakan bahwa pengelolaan kawasan wisata tersebut masih sepenuhnya dikelola oleh pemerintah kabupaten dan perlu adanya pembenahan infrastruktur, dan tidak menutup kemungkinan pengelolaan akan diserahkan kepada pihak lain.

Pulau Pisang menjadi salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Pesisir Barat berbentuk kepulauan yang menghadap langsung ke samudera Hindia dan merupakan Daerah Tujuan Wisata (DTW) provinsi Lampung. Pulau pisang terdiri dari enam desa diantaranya desa Pasar, Labuhan, Sukadana, Suka Marga, Lok, dan Bandar Dalam (Sulis, 2019). Mata pencaharian penduduknya yaitu sebagai nelayan dan membuka ladang bagi penduduk laki-laki dan perempuan menekuni kerajinan sulam kain emas dan kain tapis. Kawasan ini sangat memungkinkan untuk dijadikan salah satu destinasi ekowisata bahari karena keindahan alamnya yang berupa lautan yang mengelilinginya. Menurut Dinas Pariwisata Pesisir Barat salah satu yang menjadi daya tarik pulau pisang yaitu atraksi lomba-lomba yang bisa disaksikan wisatawan dari atas perahu terutama pada saat matahari terbit. Pulau pisang bagian utara juga menjadi tempat yang sangat cocok untuk melakukan *snorkeling* dan *diving*. Menurut (Lazuardi et al., 2013) pulau pisang memiliki pasir pantai berwarna putih yang masih alami

dan dapat dijadikan tempat pemijahan untuk empat jenis penyu dari enam jenis yang ada di dunia seperti Penyu Hijau, Penyu Sisik, Penyu Lengkang dan Penyu Belimbing, yang memberi nilai tambah bagi kawasan pulau pisang sebagai tempat untuk melakukan *snorkeling* dan *diving*. Dalam upaya menarik minat wisatawan agar datang ke pulau pisang setiap tahun Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat mengadakan sebuah event yang disebut dengan “Semarak Pulau Pisang” yang menampilkan suatu pertunjukan tradisional masyarakat yang disebut dengan *sekugha*. Selain untuk menikmati berbagai rangkaian acara perlombaan acara ini bertujuan untuk mengenalkan pulau pisang kepada para wisatawan baik lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Lomba yang di adakan untuk menyemarakkan *event* wisata ini diantaranya lomba baca puisi, lomba menyanyi, lomba menyeberangi pulau pisang dari daerah Tembakak (Putri et al., 2019).

Badan Pusat Statistik Lampung Barat dalam (Sofiyana et al., 2019), pengunjung yang datang ke pulau pisang rentang waktu Januari sampai September 2018 cenderung stabil dan menyentuh angka 100 lebih pengunjung bahkan pada bulan Juni yang bertepatan dengan libur hari raya jumlah kunjungan mencapai 5000 orang, namun kemudian turun drastis pada bulan Juli yang hanya dikunjungi wisatawan sebanyak 35 orang.

Gambar 1.1 Jumlah pengunjung bulan Januari – September 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Lampung Barat 2018.

Penurunan kunjungan ke pulau pada bulan-bulan lain seperti bulan Juli yang menurun menjadi hanya 35 orang disebabkan karena pada bulan tersebut cuaca tidak mendukung atau sedang terjadi cuaca buruk sehingga tidak memungkinkan perahu untuk menyeberang ke Pulau Pisang karena terlalu beresiko. Sedangkan pada bulan-bulan lain yang stabil diangka 100 orang hal tersebut dikarenakan wisatawan hanya mengandalkan libur *weekend* untuk menenangkan diri dan biasanya para wisatawan yang berkunjung menyeberangi pulau pisang pada pagi hari dan akan kembali pada sore harinya. Bulan Juni mengalami lonjakan pengunjung selain karena bertepatan dengan libur hari raya juga karena terdapat pertunjukan tahunan adat tradisional yaitu *sekugha*, sehingga selain untuk memanfaatkan hari libur nasional bersama keluarga untuk ke Pulau Pisang juga karena ingin menyaksikan pertunjukan tersebut yang hanya terjadi pada momen lebaran.

Pada 2018 hanya terdapat 4 *homestay* yang bisa dijadikan tempat menginap oleh wisatawan. *Homestay* tersebut bukan villa mewah tetapi rumah warga sekitar yang disewakan untuk wisatawan. Pulau Pisang juga tidak

mempunyai toko cinderamata yang merupakan ciri khas setiap daerah wisata. Meskipun dibantu dengan pengucuran dana desa yang mencapai 800 juta per desa tidak membantu secara signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Pulau Pisang. Berbeda dengan wisata pantai Tanjung Setia yang sudah memiliki 19 *homestay* yang masuk kategori mewah, 11 usaha kuliner dan 1 toko cinderamata. Hal tersebut menyebabkan pemasukan masyarakat sekitar pantai Tanjung Setia rata-rata 1-2 juta per hari. Potensi Pulau Pisang akan sulit berkembang karena pulau Pisang baru teraliri listrik yang membuat investor masih enggan untuk menanamkan modal, kemudian transportasi menuju pulau Pisang hanya mengandalkan jalur laut dengan pelayanan lokal (Yurida, 2019).

Kedatangan wisatawan mancanegara menurut warga, menyebabkan nelayan kesulitan untuk menangkap ikan besar seperti *tuhuk (blue marlin)* karena aktivitas turis asing yang berenang dipantai dan juga untuk berselancar, kemudian ditambah dengan penggunaan *sun screen* atau *sun block* yang diyakini nelayan karena bau yang ditimbulkan menyebabkan mereka akan lebih jauh berlayar dilaut jika ingin mendapatkan ikan yang besar.

Masyarakat Pulau Pisang terbiasa hidup dengan cara mereka sendiri, buta terhadap informasi dari luar, karena keterbatasan akses komunikasi dan kendala sinyal dan jaringan selama bertahun-tahun, hidup dalam kegelapan karena tidak adanya aliran listrik dan baru teraliri listrik Desember 2019 sehingga menyebabkan masyarakat perlu untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan informasi dan teknologi. Ibaratnya mereka seperti masyarakat yang baru menyadari betapa mereka sangat jauh tertinggal dari kecamatan-

kecamatan lain sehingga mereka seperti harus menikmati berbagai kemudahan yang baru dirasakan.

Padahal sudah terdapat kebijakan tentang pariwisata yang oleh pemerintah kabupaten belum sepenuhnya difokuskan pada pariwisata. Dikaji lebih jauh, sudah terdapat UU No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa , Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Artinya, hal-hal yang dimaksud harus dioptimalkan dan diupayakan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk pengembangan pariwisata. Pemerintah Pesisir Barat dalam hal pariwisata memiliki Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata. Kedua peraturan ini kemudian menjadi landasan utama bagi pemerintah kabupaten dan perangkat daerah terkait untuk komitmen pada bidang pariwisata.

Pada awal 2020 Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami guncangan oleh pandemi covid-19 yang juga berdampak besar pada sektor pariwisata, baik pusat maupun daerah. Namun, Pesisir Barat dan Pulau Pisang menjadi daerah yang tidak terlalu mengalami dampak yang signifikan dikarenakan masih berjalannya tatanan sosial dari berbagai kalangan masyarakat.

Dalam pengembangan serta pengelolaan kawasan wisata dengan potensi yang ada maka peran tersebut tidak hanya diambil alih oleh pemerintah saja, tetapi juga harus melibatkan pihak luar dari pemerintah yaitu pihak swasta atau investor dan masyarakat daerah itu sendiri. Fosler 2002 dalam (Diani & Simbolon, 2017), menyebutkan bahwa *collaborative governance* adalah upaya kerjasama yang kolaboratif antar pihak yang intensif dan pihak-pihak yang terlibat memiliki *elighment* dalam tujuan, strategi, agenda, sumber daya, dan aktivitas. *Collaborative governance* terdiri dari tiga elemen yang menjadi bagian penting, yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang akan mengarahkan kemana tujuan pariwisata tersebut dan juga sebagai pencari investor. Kedua, pihak swasta yang menjadi penghubung antara wisatawan dan masyarakat seperti menawarkan paket wisata dan penginapan. Ketiga yaitu masyarakat yang bisa memperoleh keuntungan ekonomi seperti menjadi pedagang makanan di sekitar lokasi wisata, menjual cinderamata khas daerah tersebut. Selain itu, Zadek 2008 dalam (Diani & Simbolon, 2017), menyebutkan tiga syarat yang bisa dijadikan sebagai patokan untuk terciptanya *collaborative governance*, yaitu :

1. *Collaborative governance* merupakan manifestasi dari semua standar yang di yakini oleh stakeholder yang terlibat;
2. *Collaborative governance* berarti harus melibatkan beberapa stakeholder dan tidak adanya paksaan untuk ikut terlibat;
3. *Collaborative governance* harus meliputi beberapa bagian penting dalam pemerintahan, seperti desain, implementasi, dan juga aturan.

Collaborative governance dapat menjadi desain baru dan langkah terbaik untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat dan pengembangan ekowisata bahari di Pulau Pisang karena pemerintah daerah tidak mempunyai cukup sumber daya untuk membangun infrastruktur dan fasilitas, kemudian juga pasifnya partisipasi masyarakat Pulau Pisang. Dalam hal ini, permasalahan bukan hanya harus diselesaikan oleh pemerintah daerah tetapi juga harus melibatkan pihak swasta dan juga keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekowisata bahari di Pulau Pisang. Oleh sebab itu, melalui permasalahan tersebut, saya tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana *collaborative governance* berperan untuk mengembangkan pariwisata terutama ekowisata bahari yang ada di Pulau Pisang dengan menggunakan desain baru dalam pengembangan pariwisata di Pesisir Barat yaitu *collaborative governance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan saya ambil yaitu : Bagaimana pengelolaan pariwisata eksisting yang sudah ada? Siapa saja aktor yang terlibat dalam pengembangan tersebut? Hambatan apa saja yang muncul untuk menciptakan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tulis, maka tujuan penelitian ini yaitu : Penulis mencoba untuk melihat dari kacamata *Collaborative*

Governance tentang pengelolaan dan pengembangan Ekowisata Bahari di Pulau Pisang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai referensi untuk melihat cara pengembangan dan pengelolaan pariwisata dikabupaten Pesisir Barat dengan desain baru yaitu *collaborative governance*.

1.5 Tinjauan Teoritis

1.5.1 Penelitian Sejenis

Penelitian berikut ini adalah penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata dimana penelitian terdahulu ini juga meneliti tentang hasil dari *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata, namun berbeda dengan topik yang diambil dimana pada penelitian ini lebih memberikan saran betapa pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta dan juga masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Pertama yaitu penelitian dengan judul “*Implementasi Kebijakan Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata Pada Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Utara*” yang ditulis oleh Muhammad Ali, Amil, dan Zulhadi. (Muhammad Ali dkk, 2018). Penelitian ini berada di Lombok Utara dimana meneliti tentang implementasi dari *collaborative governance* dengan fokus utama pada Badan Promosi Daerah, dimana Badan Promosi Daerah adalah lembaga

swasta yang berdiri secara independen yang bertujuan untuk melakukan promosi pariwisata baik nasional maupun internasional melalui *event-event* wisata. Badan Promosi Daerah berfokus pada promosi wisata dan peningkatan devisa, menjadi penghubung antara stakeholder dan wisatawan. Dalam penelitian ini Badan Promosi Daerah berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik nasional maupun mancanegara dengan berbagai media promosi yang digunakan seperti brosur dan iklan. Badan Promosi Daerah mampu memberikan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ataupun wisatawan lokal secara signifikan.

Kedua, merupakan penelitian yang dilakukan oleh Sumitro S. Syawal dan Suleman Samuda. (Sumitro S Syawal dan Suleman Samuda, 2017) yang berjudul “*Dinamika Collaborative Governance Dalam Festival Legu Gam Sebagai Wisata Kultural Kota Ternate*”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana dinamika-dinamika yang terbangun dan tercipta dari proses *collaborative governance* dalam pengenalan pariwisata Legu Gam yang ada di Kota Ternate. Dalam penelitian ini, membahas mengenai peran-peran yang akan di emban oleh masing-masing pihak yang berkaitan dengan kepariwisataan. Misal dalam festival Legu Gam, ada pihak-pihak yang menjadi bagian penting dari festival tersebut, ada panitia-panitia yang disusun. Penelitian ini juga menekankan bahwa kedudukan setiap pihak sama baik pemerintah, swasta, pihak kesultanan dan masyarakat juga menekankan peran penting dari pemimpin dalam menjalankan organisasi

ini. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif deskriptif yang juga sama dengan penelitian yang akan penulis teliti. Perbedaannya jika penelitian terdahulu ini membagi peran-peran yang setara antara semua pihak, maka penelitian yang akan penulis tulis menekankan pada pentingnya collaborative governance karena selama ini peran swasta dan masyarakat sangat kurang karena pemerintah juga tidak melakukan kerjasama yang baik dengan kedua belah pihak tersebut. Hal yang dapat dilihat atau kebaikan yang terdapat dalam penelitian ini terkait dengan *Collaborative Governance* yaitu Festival Legu Gam lebih membuka ruang kemajemukan bagi etnis yang hidup di Ternate. Keberagaman etnik dan budaya terdiri atas etnik asli Maluku Utara yang dikelompokkan ke dalam kelompok Gam Madihutu (penduduk asli) dan etnik Dai' Isa (pendatang).

Ketiga, penelitian yang berjudul “*Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Festival Teluk Jailolo Sebagai Wisata Budaya Di Kabupaten Halmahera Barat*” yang ditulis oleh Rasid Pora dan Asrul Sani Habib (Pora dan Asrul, 2018). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengamati bagaimana pola hubungan dengan menggunakan bentuk segitiga dalam pelaksanaan *collaborative governance* pada Festival Teluk Jailolo untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya festival ini pemerintah Halmahera ingin memperkenalkan wisata bahari dan keindahan alam bawah laut Halmahera. Dalam penelitian ini dibagi peran antara pemerintah Kabupaten, swasta dan juga partisipasi masyarakat agar sama-sama menguntungkan dan membuat festival ini berhasil dalam

pelaksanaannya karena ketiga elemen tersebut bisa saling melengkapi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu terletak pada pengenalan kawasan wisata bahari dan keindahan alam bawah laut. Manfaat Collaborative Governance yang sudah ada yaitu Dinas Pariwisata Halmahera Barat pada tahun 2015 mencanangkan program pengembangan desa wisata, dan pada tahun 2018 Kabupaten Halmahera Barat telah memiliki 16 Desa wisata.

Keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putu Yomy Yasintha (Yasintha, 2020) yang berjudul “*Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar*”. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Gianyar, Bali dan berfokus pada pengenalan pariwisata yang ada di Gianyar terutama kepada wisatawan mancanegara di tengah permasalahan pariwisata yang ada di daerah lainnya. Dalam hal ini juga dijelaskan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Memberikan gambaran dan alasan logis mengapa dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah memerlukan kolaborasi antar berbagai aktor. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah tidak akan bisa seratus persen dapat mengelola pariwisata terutama dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pihak-pihak lain yang bersedia berkolaborasi untuk mengembangkan pariwisata. Dalam penelitian ini juga dikatakan bahwa kolaborasi yang dilakukan belum maksimal karena kurangnya kesadaran dari pengusaha maupun masyarakat, dan ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mulai melakukan kerjasama. Manfaat

Collaborative Governance dalam penelitian ini yaitu dalam hal budaya seperti inovasi di Kabupaten Gianyar khususnya Kebun Raya Gianyar sebagai konservasi lahan dan tanaman untuk keperluan upacara adat di Bali.

Kelima, penelitian yang berjudul “*Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata*” yang ditulis oleh Ardhia Mafaza dan Kristina Setyowati (Mafaza dan Setyowati, 2020). Berlokasi di desa sekitar Candi Borobudur yang berfokus pada pengembangan wisata berbasis desa, dimana berusaha memberikan fokus utama pada pariwisata lokal yang ada di desa agar tidak berpusat pada Candi Borobudur saja. Bertujuan agar daerah-daerah sekitar Candi Borobudur juga menjadi destinasi wisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan program Balai Ekonomi Desa (Balakondes) seperti pembangunan *homestay*. Dengan melibatkan para *stakeholder* penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang akan saya tulis yaitu pengembangan pariwisata bahari di Pulau Pisang dan juga menonjolkan sisi kearifakan lokal masyarakat seperti kerajinan tapis yang dapat mendongkrak ekonomi masyarakat, dan juga dengan adanya *collaborative governance* dapat memperbaiki baik infrastruktur maupun tata cara pengelolaan pariwisata yang baik agar pariwisata semakin berkembang.

Dari penelitian terdahulu diatas, sudah dijelaskan bahwa *collaborative governance* sangat penting terutama untuk pengembangan pariwisata yang tidak dapat dikelola seorang diri oleh pemerintah. Dalam penelitian yang akan saya teliti ini saya akan lebih menekankan mengenai model atau desain

baru dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat khususnya pengembangan Ekowisata Bahari yang ada di Kecamatan Pulau Pisang.

1.5.2 Landasan Teori

World Bank mengartikan *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development society*” yang berarti cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. Dari penjelasan World Bank tentang *governance* dapat disimpulkan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh negara merupakan kunci utama dalam pembangunan masyarakat. UNDP memberikan pengertian tentang *governance* yaitu “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels*” dapat diartikan sebagai penggunaan atau pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan (Manaf, 2016). *Governance* atau pemerintahan memperlihatkan kegiatan kekuasaan didalam ranah umum (Labolo, 2005). Diartikan bahwa *governance* atau pemerintahan tidak hanya merujuk pada pemerintah itu saja, tetapi lebih kompleks dengan aktivitas kelembagaan dengan tujuan memberi arahan, kendali, mengatur hal-hal yang berkorelasi dengan ranah publik yaitu kepentingan warga negara, hak pemilik suara, dan pekerja.

Governance melibatkan aspek penyelenggaraan negara yang dilaksanakan bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga swasta (*private sector*), dan

masyarakat sukarela (*civil society sector*) (Setiyono, 2014). Finer 1974 dalam (Setiyono, 2014), mendefinisikan *governance* :

“Governance by contrast, refers to the process of making collective decisions, a task in which government may not play a leading, or even, any role. In international relations, for example, no world government exist to resolve problems but many issues are resolved by negotiation”. (Kepemerintahan, sebaliknya, merujuk pada proses pembuatan keputusan bersama, sebuah tugas dimana pemerintah bisa jadi tidak berperan sebagai pemimpin, atau bahkan peran apa pun. Dalam hubungan internasional, contohnya, tidak ada pemerintah kelas dunia untuk mengatasi masalah-masalah tapi banyak isu diselesaikan dengan negosiasi).

Ketiga bagian dari *governance* tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing, yaitu :

- a. *Public sector* (pemerintah) , ruang untuk publik menitahkan mandat terhadap birokrat sebagai aturan tata kehidupan bersama dengan kepemilikan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang biasanya mandat tersebut dimiliki melalui proses pemilu, undang-undang, dan sistem birokrasi. Termasuk dalam sektor pemerintah yaitu presiden, parlemen, menteri, gubernur, bupati/walikota, dan instansi birokrasi.

- b. *Private sector* (swasta), ruang dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan serta tujuan mereka secara pribadi yang bergantung pada kekuatan ekonomi untuk memperoleh *profit* sehingga dipengaruhi oleh adanya perhitungan ekonomi dengan hukum penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Termasuk dalam sektor swasta yaitu perusahaan swasta, pengusaha kecil, profesional/pelaku bisnis individual.
- c. *Community sector* (masyarakat sukarela), ruang dimana masyarakat bergerak tanpa motivasi yang berkaitan dengan ekonomi atau kekuasaan. Dalam artian lain bahwa masyarakat adalah pihak yang akan turut berpartisipasi dalam lingkup dua sektor (pemerintah dan swasta) yang akan berinteraksi dan menjalin relasi karena ketiganya saling membutuhkan.

Ansell dan Gash, 2007 dalam (Lukito & Haryanto, 2016), *collaborative governance* yaitu :

“collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actors work collectively in distinctive ways, using particular process, to establish laws and rules for provision of public goods”. (*collaborative governance merupakan salah satu tipe governance dimana aktor publik dan privat bekerja secara bersama dengan cara khusus, menggunakan proses tertentu, untuk menetapkan hukum dan aturan untuk menentukan publik yang baik*).

Donahue dan Zeckhauser, 2011 dalam (Irawan, 2017) mengartikan *collaborative governance* sebagai :

“collaborative governance can be thought of a form of agency relationship between government as principal, and private players as agent”. (Pemerintahan yang kolaboratif dapat dianggap sebagai suatu bentuk hubungan kerja antara pemerintah sebagai regulator dan pihak swasta sebagai pelaksana”.

Collaborative governance dapat diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor *governance* agar tujuan-tujuan positif dari masing-masing pihak dapat tercapai (Irawan, 2017). Ratner, 2012 dalam (Irawan, 2017), menjelaskan bahwa terdapat 3 fase atau tahapan dalam proses *collaborative governance* , yaitu :

1. *Identifying Obstacles and Opportunities* (Fase Mendengarkan)

Tahap dimana pemerintah dan *stakeholders* akan melakukan identifikasi mengenai apa saja hambatan selama proses tatakelola pemerintahan. Pada tahap ini *stakeholders* menerangkan mengenai permasalahan dan *stakeholders* lainnya mendengarkan.

2. *Debating Strategies For Influence* (Fase Dialog)

Merupakan lanjutan dari fase pertama dimana fase kedua ini para pemangku kepentingan dan *stakeholders* melakukan dialog

untuk mendiskusikan hambatan yang diterangkan pada fase pertama. Mendiskusikan langkah paling efektif untuk memecahkan permasalahan tersebut.

3. *Planning Collaborative Actions* (Fase Pilihan)

Setelah melakukan tahap menerangkan dan mendengarkan permasalahan yang dihadapi, kemudian dilanjutkan dengan tahap mendiskusikan strategi untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka sampailah pada tahap ketiga yaitu tahap dimana *stakeholders* atau pemangku kepentingan yang terlibat mulai menyusun perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang telah ditentukan dan menjaga proses kolaborasi agar berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

Selain tahapan atau proses yang ada dalam proses *collaborative governance* juga terdapat 8 kriteria yang bisa dijadikan patokan dalam menentukan keberhasilan proses kolaborasi tersebut. Menurut Goldsmith dan Kettl, 2009 dalam (Irawan, 2017), kriteria tersebut seperti *Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among The Participants, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability/Responsibility, Information Sharing, Access to Resources*.

1. *Networked Structure*

Keterkaitan elemen satu dengan elemen lain, sama-sama menonjolkan unsur fisik dari jaringan yang sedang ditangani dan tidak boleh menciptakan hirarki kekuasaan dari salah satu pihak yang ikut dalam kolaborasi.

2. *Commitment to a Common Purpose*

Jaringan yang terbentuk harus memiliki komitmen terhadap tujuan-tujuan dari organisasi dan tidak boleh memihak salah satu pihak yang ada dalam kolaborasi, tetapi harus berdasarkan komitmen untuk mencapai tujuan bersama.

3. *Trust Among The Participants*

Setiap *stakeholders* harus saling percaya sebagai wujud dari hubungan profesional yang terjalin untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan kolaboratif.

4. *Governance*

Merupakan hubungan saling percaya antara para aktor dalam pemerintahan. Tatakelola dapat dikatakan *governance* apabila dapat dipisahkan mana pihak yang terlibat dan mana pihak yang tidak terlibat.

5. *Access to Authority*

Aturan yang mengatur setiap kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholders* agar bisa menjalankan perannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

6. *Distributive Accountability / Responsibility*

Pembagian tanggungjawab yang jelas, dan masing-masing *stakeholders* (termasuk masyarakat) harus terlibat dalam pembuatan keputusan.

7. *Information Sharing*

Harus ada pembagian informasi yang jelas dan masing-masing *stakeholders* harus diberi kemudahan dalam akses informasi.

8. *Access to Resources*

Harus ada kejelasan dan ketersediaan sumber daya bagi setiap *stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi tersebut.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Collaborative Governance adalah proses kerjasama yang melibatkan aktor-aktor dalam negara seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam proses pengembangan pariwisata tentunya tidak hanya tugas dari pemerintah, tetapi juga harus melibatkan swasta dan masyarakat yang memiliki perannya masing-masing. Tujuan dilakukannya *collaborative governance* yaitu untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat karena dalam proses pengembangan tersebut harus ada campur tangan pihak lain yang juga berkepentingan. Selain itu, pemerintah tidak dapat bekerja sendirian karena kurangnya banyak sumberdaya oleh pemerintah maka perlu peran pihak lain untuk melengkapi kekurangan tersebut.

Dalam penerapan serta pelaksanaan *collaborative governance* tentunya harus sesuai dengan 3 tahapan proses *collaborative governance* yaitu *Identifying Obstacles and Opportunities* (Fase Mendengarkan), *Debating Strategies For Influence* (Fase Dialog), dan *Planning Collaborative Actions* (Fase Pilihan), dan juga 8 kriteria keberhasilan *collaborative governance* seperti *Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among The Participants, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability/Responsibility, Information Sharing, Access to Resources*.

Tabel 1.1 Fase Dalam Proses Collaborative Governance

Fase Dalam Proses <i>Collaborative Governance</i>		
Konsep	Dimensi	Indikator
<i>Identifying Obstacles and Opportunities</i> (Fase Mendengarkan)	Masing-masing <i>stakeholder</i> memberikan gambaran mengenai permasalahan dan solusi.	Ketiga <i>stakeholder</i> hadir dalam satu forum dan melakukan diskusi.
<i>Debating Strategies For Influence</i> (Fase Dialog)	Munculnya solusi atau strategi dari permasalahan dan ditentukan pihak mana saja yang terlibat.	Terlibatnya pihak lain diluar <i>stakeholder</i> yang ada.
<i>Planning Collaborative Actions</i> (Fase Pilihan)	Menyusun perencanaan untuk mengimplementasikan strategi yang sudah di setujui.	Kebijakan yang dipilih sudah jelas dan siap untuk dilaksanakan.
8 Kriteria Keberhasilan <i>Collaborative Governance</i>		
Konsep	Dimensi	Sub Indikator
Kolaborasi Pemerintahan	<i>Networked Structure</i> / Struktur Jaringan	Adanya kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah,

<p><i>(Collaborative Governance)</i></p>	<p>(Keterkaitan elemen satu dengan yang lainnya yang sama-sama menonjolkan unsur fisik dari jaringan yang ditangani dan tidak boleh menciptakan hirarki kekuasaan dari salah satu pihak yang ikut dalam kolaborasi).</p>	<p>Swasta, dan Masyarakat yaitu dengan menyusun program kerja.</p>
	<p><i>Commitment to a Common Purpose / Komitmen Terhadap Tujuan</i> (Jaringan yang terbentuk harus memiliki dedikasi terhadap tujuan-tujuan dari organisasi dan tidak boleh memihak salah satu pihak yang ada dalam kolaborasi).</p>	<p>Memiliki pemahaman yang sama dalam upaya untuk mencapai tujuan. Misal sudah memahami kenapa mereka harus berkolaborasi.</p>
	<p><i>Trust Among The Participants / Kepercayaan</i> (Setiap <i>stakeholders</i> harus saling percaya sebagai</p>	<p>Masing-masing <i>stakeholders</i> menjalankan fungsinya dengan baik.</p>

	wujud dari hubungan profesional yang terjalin).	
	<i>Governance</i> (Tatakelola dapat dikatakan <i>governance</i> apabila dapat dipisahkan mana pihak yang terlibat dan tidak terlibat).	Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi.
	<i>Access to Authority / Akses terhadap Kekuasaan</i> (Aturan yang mengatur setiap kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing <i>stakeholders</i>).	Aturan yang jelas, dan hak yang sama terhadap akses kekuasaan.
	<i>Distributive Accountability / Responsibility /</i> Pembagian Akuntabilitas (Pembagian tanggungjawab yang jelas, dan masing-masing <i>stakeholders</i> (termasuk	Stakeholders yang responsive.

	masyarakat) harus terlibat dalam pembuatan keputusan).	
	<i>Information Sharing</i> / Berbagi Informasi (Yaitu pembagian informasi yang jelas dan masing-masing <i>stakeholders</i> harus diberi kemudahan dalam akses informasi).	Tidak terbatasnya informasi.
	<i>Access to Resources</i> / Akses terhadap Sumber Daya (Yaitu kejelasan dan ketersediaan sumber daya bagi setiap <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam kolaborasi tersebut seperti SDM, SDA, dan Prasarana).	SDM, Sumber daya Uang, Sumber daya sarana prasarana yang memadai.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis akan menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Biklen, 1992 dalam (Rahmat, 2009), penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku dari individu atau masyarakat yang disetting dalam konteks tertentu yang kemudian dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Nawawi, 1983 dalam (Hidayat, 2009), deskriptif berdasarkan dua ciri utama pemusatan perhatian terhadap masalah saat melakukan penelitian (sekarang) atau masalah dengan sifat aktual, kemudian digambarkan sebuah fakta terkait masalah yang diselidiki diiringi interpretasi masuk akal. Penelitian kualitatif tidak mengharuskan untuk menyusun daftar pertanyaan baku terlebih dahulu karena sebuah kenyataan sosial dapat diamati melalui bahasa tubuh, perilaku, ungkapan atau ucapan responden. Sugiyono, 2006 dalam (Pratiwi, 2017), data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Pulau Pisang dan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

1.7.3 Subjek Penelitian

Informan utama yang akan dijadikan penulis sebagai sumber utama informasi data dari instansi terkait, yaitu diantaranya :

1. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.
2. Swasta (pengusaha hotel atau restoran).
3. Masyarakat Pulau Pisang pengrajin kain tapis.

1.7.4 Jenis Data

Dikarenakan penelitian yang akan ditulis oleh penulis menggunakan pendekatan kualitatif, maka terdapat dua jenis data yang akan digunakan, yaitu :

1. Data Primer

Umi Narimawati, 2008 dalam (Pratiwi, 2017), data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama, tidak tersedia dalam bentuk file, dan datanya harus dicari melalui narasumber atau responden yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi.

2. Data Sekunder

Merupakan data pendukung data primer atau yang melengkapi data primer. Data sekunder biasanya didapatkan melalui kepustakaan, dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data akan menggunakan teknik :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu peneliti akan terjun langsung kelapangan untuk mengamati aktivitas apa yang terjadi dilapangan sesuai dengan kenyataan dan realita yang ada untuk mendapatkan informasi. Dalam melakukan observasi atau pengamatan maka penulis akan melakukan pengamatan sesuai dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana penulis atau peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan sesuai dengan objek yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti akan mengajukan pertanyaan dan melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, Camat Kecamatan Pulau Pisang, Masyarakat Pulau Pisang, dan Wisatawan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data sekunder yang digunakan untuk melengkapi data primer. Ini perlu dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan dukungan data yang selaras dan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar,

yang digunakan peneliti untuk menguatkan temuan hasil dari data primer.

1.7.6 Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan juga dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat sebuah kesimpulan (Sugiyono,2016 dalam (Pratiwi, 2017).

Dalam menjabarkan cara analisis data menurut Sugiyono maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahapan dimana peneliti akan merangkum, kemudian memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari polanya. Artinya, peneliti harus membuat rangkuman yang berisi data-data yang penting saja.

2. Penyajian data

Penyajian data menggunakan metode kualitatif biasanya dengan teks yang bersifat naratif. Pada saat penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori.

3. Penarikan Kesimpulan

Sebuah tahapan terakhir dari proses penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis tulis dan pertanyakan. Dalam penelitian kualitatif kesimpulan adalah temuan baru yang didalamnya dapat menjelaskan kesimpulan dari data-data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi.